

NEGARA-NEGARA JAJAHAN PRANCIS DAN ALJAZAIR DAN KEMERDEKAAN TUNISIA

A. Latar Belakang

Prancis adalah negara yang berbentuk Republik. dan beribukota di Paris nama resmi negara Prancis sendiri adalah France Republic, secara geografis Prancis terletak di Barat laut benua Eropa dan merupakan negara terluas di benua Eropa (Mulyana, 2017). Negara Prancis memiliki peran yang cukup penting dikancah politik internasional. Prancis merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi internasional, dan sering disamakan dengan negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Prancis menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Pada saat ini Prancis telah menjadi aktor utama dalam politik internasional. Dimana Prancis sering ikut terlibat dalam usaha perdamaian dalam berbagai konflik. (Flower, Bisson, & Blondel, 2018) Prancis sendiri telah beberapa kali terlibat dalam konflik yang terjadi di benua Afrika, dimana banyak terdapat negara-negara bekas jajahan Prancis di benua Afrika pada masa kolonial. kolonialisme Perancis di benua Afrika terdiri dari berbagai aspek yang menggambarkan latar belakang, tujuan, serta konsekuensi dari berbagai kegiatan kolonialisme yang dilakukan oleh negara tersebut. Prancis adalah salah satu negara Eropa yang banyak melakukan kolonialisme dan imperialisme, termasuk di wilayah Afrika. Orang-orang Prancis pada umumnya menganggap tugas utama mereka ialah mengubah orang-orang Afrika menjadi orang Prancis yang lebih beradab. Ada keyakinan dalam pikiran banyak orang Prancis pada masa itu bahwa suatu ikatan kultural dan politik antara Prancis dan jajahannya dapat jauh melampaui tujuan-tujuan ekonomi. Keseriusan Prancis untuk “memerancis-kan Afrika” bahkan membuat Prancis pada 1946 menjadikan orang-orang Afrika yang ada di wilayah jajahannya sebagai warga negara Prancis, (Kurniawati, 2010)

Aljazair merupakan salah satu wilayah dari kawasan Afrika Utara. Aljazair terletak di belahan Afrika Utara yang berbatasan dengan laut Mediterania. Karena letak geografis ini, Aljazair menjadi sumber daya alam yang sangat berlimpah dibanding dengan kawasan Afrika Utara yang lainnya. Aljazair memiliki sejarah panjang karena banyak dikuasai berbagai suku dan bangsa-bangsa asing, sehingga membuat Aljazair pernah tidak memiliki pemerintahan pusat dan identitas teritorial. Namun setelah di kuasai berbagai bangsa, Aljazair mengalami perubahan dalam struktur sosialnya. Banyaknya

pengelompokan suku-suku membuat Aljazair menjadi terbelah dan mudah dipengaruhi dari bangsa luar, (Anam, 2019).

Republik Tunisia adalah sebuah Negara Arab di Afrika Utara, yang nama resminya Republik Tunisia, beribu kota Tunis tepatnya di pesisir laut Tengah. Di antara negara-negara yang terletak di rangkaian pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara tanah subur. Republik Tunisia adalah sebuah Negara Arab di Afrika Utara, yang nama resminya Republik Tunisia, beribu kota Tunis tepatnya di pesisir laut Tengah. Di antara negara-negara yang terletak di rangkaian pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara tanah subur, (Mamnuniyatillah, 2022).

B. Negara-Negara Jajahan Prancis di Afrika

1. Kekuasaan Prancis di Aljazair hingga Kemerdekaan Aljazair

Aljazair adalah salah satu wilayah di kawasan Afrika Utara. Aljazair terletak di belahan Afrika Utara yang berbatasan dengan laut Mediterania. Karena letak geografis ini, Aljazair mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dibandingkan dengan kawasan Afrika lainnya. Aljazair dibagi menjadi dua bagian yaitu bangsa Arab dan Bangsa Berber. Penduduk asli Aljazair adalah suku Berber. Aljazair beberapa kali dikuasai oleh bangsa asing, disebabkan oleh penduduknya yang terbagi-bagi ke dalam dua suku, (hak, 2015).

Sebelum Prancis menguasai Aljazair ada beberapa bangsa asing dan dinasti yang telah menguasai Aljazair ini seperti bangsa Yunani dan Romawi, Dinasti Rustamiyyah, Dinasti Al Murabitun, Dinasti Al Muwahhidun, Dinasti Hafsiyah, Dinasti Mariniyah, dan Turki Utsmani. Pada awal kedatangan Prancis kondisi Aljazair masih sepenuhnya dipimpin oleh beberapa suku dan para pemimpin sufi. Namun setelah Prancis menguasai secara menyeluruh banyak bidang yang diganti peraturannya oleh pihak Aljazair di antaranya dalam bidang politik-ekonomi dan pendidikan. Pihak Prancis memilih pemimpin pemerintahan yang tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat karena itulah Prancis bukan mengambil dari kalangan Sufi. Sehingga dengan mudah Prancis memberikan kebijakan dan disetujui, (hak, 2015).

Tahun 1830 Prancis mengalami kemunduran akibat kealahannya melawan Yunani sehingga Charles X yang diutus oleh raja Prancis untuk melakukan penyerbuan terhadap

Aljazair. Hal ini, merupakan salah satu cara untuk mengalihkan persoalan krisis ekonomi yang dialami Prancis atas kekalahannya melawan Yunani. Awalnya Prancis hanya ingin menguasai beberapa kota saja yang berada di pesisir, namun saat itu pemerintahan Turki Utsmani mengalami kemerosotan sehingga menjadi jalan bagi Prancis dalam menguasai Aljazair secara menyeluruh. Pada tahun 1832 di Aljazair terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdul Qadir. Abdul Qadir mendeklarasikan diri sebagai pemimpin orang-orang Arab, bertanggung jawab untuk mengaplikasikan hukum Islam di Aljazair dan melawan aksi kolonial Prancis. Perjuangannya memperlihatkan seberapa besar loyalitasnya kepada masyarakat Aljazair. Tetapi upaya perlawanan tersebut membawa Aljazair secara menyeluruh di bawah kekuasaan Prancis. Akhirnya semua perlawanan bersenjata termasuk pasukan Abdul Qadir dan lainnya dihancurkan (Anam, 2019)

Dibawah pimpinan Jendral Beguaed militer Prancis semakin kuat, karena berambisi untuk menguasai Aljazair secara keseluruhan. Dengan begitu serangan terus dilancarkan oleh militer Prancis yang melawan pasukan pembela Aljazair dibawah pimpinan Abdul Qadir, sehingga pihak Aljazair mengalami kekalahan para pasukan dibunuh dan para pemimpinnya diasingkan. Secara otomatis Aljazair secara utuh dikuasai oleh Prancis. Prancis mulai mengambil alih kekuasaan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan peraturan di Prancis. Di bawah pimpinan Beguaed hak-hak masyarakat direbut secara paksa. Dimulai dengan migrasinya para penduduk yang berasal dari bangsa Eropa, Italia dan Spanyol yang bermukim di Aljazair. pada tahun 1847 jumlah penduduk Eropa yang bermigrasi ke Aljazair mencapai 109.000 jiwa. Keadaan masyarakat di Aljazair semakin melemah saat semua peraturan diambil alih oleh Prancis. Terjadinya beberapa kali perlawanan oleh penduduk Aljazair namun, bisa di halau oleh pasukan militer. Hal ini membuat pemberontakan yang dilakukan hanya menjadi sia-sia. Pemberontakan yang dilakukan penduduk Aljazair menambah pasukan Prancis lebih berani dalam menguasai Aljazair. Pemberontakan ini membuat munculnya beberapa kebijakan yang dicanangkan oleh pemimpin Prancis yang di setujui oleh pemimpin pusat di Eropa. (hak, 2015).

Aljazair mendapatkan kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 5 Juli 1962 setelah berjuang melalui perang kemerdekaan yang berlangsung selama delapan tahun. Perang ini dimulai pada 1 November 1954, ketika Front Pembebasan Nasional (FLN) Aljazair melancarkan serangan terkoordinasi terhadap instalasi-instalasi Prancis di Aljazair. Konflik ini merupakan perang gerilya yang sangat intensif, dengan kedua belah pihak mengalami banyak korban jiwa.

Perjuangan kemerdekaan Aljazair dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ahmed Ben Bella, Houari Boumediene, dan lainnya. Di tengah tekanan internasional dan tekanan dari dalam negeri Prancis, terutama setelah terjadinya Pemberontakan Aljazair, pemerintah Prancis akhirnya setuju untuk mengadakan referendum yang menghasilkan pemungutan suara yang mendukung kemerdekaan Aljazair. Setelah kemerdekaannya, Aljazair mengalami proses rekonstruksi nasional yang melibatkan upaya-upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembentukan identitas nasional yang baru.

C. Perjanjian Bardo pada Tahun 1881

(Anwar, 2022) Menjelaskan bahwa, perjanjian Bardo 1881 adalah perjanjian yang ditandatangani pada 12 Mei, dimana perjanjian ini menandai titik balik penting dalam sejarah Tunisia. Pada saat itu, Tunisia berada dalam ketegangan antara Kekaisaran Ottoman dan Prancis yang bersaing untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Perundingan untuk perjanjian tersebut dipicu oleh keinginan Prancis untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politiknya di Tunisia yang tengah mengalami ketidakstabilan.

Perjanjian Bardo menetapkan Tunisia sebagai protektorat Prancis, yang berarti Prancis memperoleh kendali penuh atas urusan luar negeri dan pertahanan negara tersebut. Menurut (Ikeda, 2015), meskipun Tunisia masih mempertahankan kemerdekaannya secara nominal, pemerintahan dan kebijakan utamanya dikendalikan oleh Prancis. Selain itu, Prancis juga diberi hak-hak ekonomi yang luas di Tunisia, termasuk hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengontrol sektor-sektor ekonomi penting.

Dampak perjanjian ini terasa dalam perlawanan dan ketidakpuasan di kalangan warga Tunisia. Meskipun memberikan stabilitas relatif di bawah pemerintahan Prancis, perjanjian tersebut juga memicu perlawanan di kalangan warga Tunisia yang menentang kolonialisasi (Anwar, 2022). Perlawanan tersebut muncul dalam bentuk gerakan nasionalis yang menuntut kemerdekaan dari dominasi Prancis.

Menurut (Imaduddin, 2021), kolonialisasi Prancis membawa transformasi besar dalam struktur sosial dan ekonomi Tunisia. Pengaruh budaya, kebijakan ekonomi, dan struktur politik Tunisia diubah secara signifikan selama periode ini. Meskipun Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956, perjanjian Bardo tetap menjadi titik balik penting dalam

sejarah negara tersebut, menandai awal dari periode kolonialisasi yang panjang dan perjuangan menuju kemerdekaan yang akan berlangsung hingga abad ke-20.

Jadi, secara keseluruhan Perjanjian Bardo 1881 menjadi tonggak bersejarah yang menandai dimulainya era kolonialisasi Prancis di Tunisia. Meskipun memberikan stabilitas relatif, perjanjian tersebut memicu perlawanan dan ketidakpuasan di kalangan warga Tunisia yang menentang dominasi Prancis. Dampaknya terasa dalam transformasi sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Meskipun Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956, perjanjian Bardo tetap menjadi simbol dominasi Prancis dan perjuangan menuju kemerdekaan yang berlangsung hingga abad ke-20.

D. Prancis Di Tunisia Hingga Kemerdekaan Tunisi

Penaklukan Prancis atas Tunisia terjadi pada tahun 1881 tepatnya melalui Perjanjian Bardo. Berbagai usaha masyarakat Tunisia untuk dapat memperoleh kemerdekaannya diwarnai oleh berbagai bentuk perjuangan kemerdekaan Tunisia yang dipimpin oleh berbagai gerakan nasionalis. Berikut gerakan-gerakan nasionalis Tunisia dalam rangka meraih kemerdekaan atas Prancis, diantaranya yaitu sebagai berikut.

A. Gerakan Pemuda Tunisia

Gerakan ini merupakan salah satu gerakan partai politik Tunisia yang dibentuk oleh kaum intelektual muda disana pada tahun 1907. Selain itu mereka juga mendirikan surat kabar *Le Tunisien*. Partai politik ini dipimpin oleh Ali Bash Hamba dan Bashir Sfar. Partai ini diikuti oleh kalangan muda terpelajar dan profesional muslim. Tujuan dari berdirinya Gerakan Pemuda Tunisia ini adalah untuk menuntut kendali penuh Tunisia atas pemerintahan dan administrasi negara, serta hak kewarganegaraan Tunisia (Britannica, 1957). Pada tahun 1911, partai ini memprotes secara besar-besaran terhadap pendaftaran pemakaman muslim sebagai milik umum Prancis, yang mana hal tersebut pun menyebabkan terjadinya kerusuhan hingga pembunuhan di Tunis dan memakan banyak korban, akibatnya tokoh-tokoh nasionalis Tunisia ditangkap oleh Prancis dan di usir dari Tunisia. Pada Juni 1912 warga Tunisia yang berjumlah 35 orang yang dianggap terlibat pada kerusuhan tahun 1911 di adili, dengan tujuh orang di hukum mati.

B. Partai Destour

Partai Destour berdiri pada tahun 1920 dengan dipimpin oleh Syeikh al Ta'libi yang juga merupakan pemimpin kaum muda Tunisia. Tujuan dibentuknya partai ini adalah untuk membebaskan Tunisia dari penjajahan Prancis. Partai ini sering mengadakan demonstrasi dan aksi masa untuk menentang kebijakan Prancis, aksi yang dilakukan juga tidak jarang melibatkan kerusuhan dan kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan Partai Destour dinilai radikal oleh Prancis. Syeikh al Ta'libi selaku pimpinan partai pun diasingkan pada tahun 1923 hingga tahun 1925 yang mengakibatkan Partai Destour resmi dilarang pada tahun 1933 (Britannica, 1957).

C. Partai Neo-Destour

Didirikan pada 2 Maret 1934 oleh Habib Bourguiba yang bertujuan untuk meneruskan perjuangan dari Partai Destour. Dibawah pimpinan Borguiba perjuangan nasionalisme semakin kuat mengakibatkan Prancis mereformulasi kebijakannya secara lebih terbuka dan lebih sensitif terhadap tuntutan-tuntutan dari Tunisia. Pada 27 Februari 1956 Habib Bourguiba datang ke Prancis sebagai pemimpin delegasi Tunisia untuk bernegosiasi dengan Prancis mengenai kemerdekaan Tunisia (Nurbaiti, 2018). Hingga akhirnya pada 20 Maret 1956, kemerdekaan Tunisia diakui secara resmi oleh Prancis dan pemerintahan Tunisia pun dikembalikan. Bourguiba pun kemudian diangkat sebagai Presiden Tunisia. Seiring dengan penghapusan sistem monarki dan merubah Tunisia menjadi negara republik pada 25 Juli 1957, Undang-Undang Dasar Tunisia pun segera dibentuk dan resmi ditetapkan sejak 1 Juni 1959.

E. Rangkuman

Benua Afrika dahulunya sempat dikuasai oleh beberapa bangsa Eropa, salah satunya yakni Prancis. Sebelum Perang Dunia I, Prancis telah memiliki koloni yang luas di benua Afrika, yang mana Aljazair dan Tunisia atau Tunis menjadi salah satu wilayah koloni Prancis pada saat itu. Sebagian besar daerah koloni Prancis tersebar di tiga wilayah Afrika, seperti wilayah Afrika Barat Laut, wilayah Afrika Barat, dan wilayah Afrika Equatorial. Aljazair dan Tunisia menjadi salah satu wilayah koloni Prancis di Afrika. Pada mulanya kedatangan Prancis mengklaim ingin membebaskan Aljazair dari kekuasaan Utsmani, namun ternyata pada kenyataannya Prancis memiliki maksud tersembunyi untuk dapat menguasai Aljazair. Sedangkan di Tunisia, Prancis

menduduki Tunisia dengan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Bardo 1881, dan bukan dengan ekspansi fisik ke wilayah Tunisia tersebut. Melalui Perjanjian Bardo 1881 tersebut, Prancis pun membuat wilayah protektorat di Tunisia. Aljazair meraih kemerdekaannya sebagai Republik Aljazair pada tahun 1962, sedangkan Tunisia meraih kemerdekaannya pada tahun 1956 setelah melalui berbagai perlawanan dengan Prancis.

F. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat!

1. Jelaskan apa saja Negara-negara jajahan Prancis di Afrika?
2. Bagaimana kekuasaan Prancis di Aljazair hingga kemerdekaan Aljazair ?
3. Jelaskan perjanjian Bardo pada tahun 1881 ?
4. Jelaskan bagaimana Prancis di Tunisia hingga Kemerdekaan Tunisia?

G. Rujukan

- Anam, S. (2019). *Sejarah Perkembangan Islam Di Aljazair* . Di Tuots: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2).
- Abdelhamid, H. (2014). *The French Protectorate in Tunisia: A History of Colonialism and Resistance*. Journal of North African Studies, 19(4), 521- 543.
- Bouhdiba, A. (1973). *The Impact of French Colonialism on Tunisian Culture*. International Social Science Journal, 25(3), 467-484.
- Britannica. (1957). *Partai Konstitusi Liberal Tunisia, Gerakan Pembebasan Nasional*. Britannica.com. Diambil kembali dari <https://www.britannica.com/topic/Young-Tunisians>. Diakses tanggal 23 Maret 2024.
- Bourouiba, R. (2011). *The Making of Modern Tunisia: Colonialism, Nationalism, and Decolonization*. Cambridge University Press.
- Cooper, F. (2002). *Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa*. Cambridge University Press.
- Crouzet, F. (2007). *Le protectorat français en Tunisie (1881-1956)*. Paris: Fayard. Entelis, J. P. (1980). *The Tunisian Nationalist Movement: A Case Study in Colonial Resistance*. International Journal of Middle East Studies,, 11(4), 481-500.
- Esposito, John L. (2001). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Fuller, Graham, E. (1996). *The Next Fundamentalist State*. USA: Rand. Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Cornell University Press.
- Khalili, L. (2007). *Tunisia: Colonialism and Independence*. Third World Quarterly, 28(7), 1263-1281.
- Kusmayadi, Yadi. (2018). *Pengaruh Konverensi Asia Afrika (KAA) 1955 Terhadap Kemerdekaan Negara-Negara Di Benua Afrika*. Jurnal Agatsya, Vol. 8(1).

- Levy, Michael, I. (2010) *The History of North Africa*. New York: Britannica Education Publishing.
- Lewis, M. D. (2014). *Divided Rule: Sovereignty and Empire in French Tunisia, 1881–1938 (1st ed)*. United State Of America: University of California Press. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt4cgf5h>
- Nevill, Barbour, D. (2022). *The Protectorate (1881–1956)*. Retrieved from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Tunisia/The-Jasmine-Revolution>
- Nurbaiti, V. (2018). *Transisi Demokrasi Di Tunisia Pasca Arab Spring*. Universitas Lampung.
- Prasad, B. (1960). *Contemporary Africa*. London: Asia Publishing House. Romein, J., Machten, van, D., T. (1950). *Wereldbibliotheek N. V.* Amsterdam Anterwerpen.
- Rizal, R. (2022). *Negara Mayoritas Islam Yang Pernah Dijajah Prancis*. Sindonews.com. Diambil kembalidari <https://international.sindonews.com/read/818971/41/negara-mayoritas-islam-yang-pernah-dijajah-prancis>. Diakses tanggal 23 Maret 2024.
- Rouseet, Camille. (1889). *Conqueta De L'algerie 1841-1887*. Paris: Librere Plon. Sastradinata, K. & Padmawijaya, R. (1977). *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa-Bangsa Afrika*. Bandung: FKIP. Soeratman, D. (2012). *Sejarah Afrika*. Yogyakarta: Ombak.
- Ul'hak, Silpia. (2016). *Dampak Kebijakan Prancis Terhadap Masyarakat Aljazair 1830-1914*. Skripsi Adab Dan Humaniora. Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Widodo, S., Yunus, A. Rahim, Syukur, Syamzan. (2022). *Perjuangan Negara- Negara Muslim Untuk Mencapai Kemerdekaan*.
- Wallbank, Walter, T. (1964). *Contemporary Africa: Continent in Transition*. Toronto, New York, London: D.Van Nostrand Company Inc.
- Yuliani. (2020). *Modul Pembelajaran Sma Sejarah Kelas Xi: Hubungan Perkembangan Paham-Paham Besar; Demokrasi, Liberalisme, Sosialisme, Nasionalisme, Pan-Islamisme Dengan Gerakan Nasionalisme Di Asia-Afrika*.
- Zartman, W. (2009). *The Legacy of French Colonialism in Tunisia*. *Mediterranean Politics*, 14(2), 235-253.